



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2022-2023
KAMIS, 13 APRIL 2023**

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,*

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.

Perkenankan Kami, atas nama Pimpinan DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di tanah air.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sejak reformasi, prakek-praktek dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin demokratis; aspek-aspek keterbukaan

publik, akuntabilitas, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya.

Walaupun di negara demokratis terdapat ruang kebebasan dalam menggunakan hak politik, hak sosial hak ekonomi, dan hak budaya, bukanlah berarti kebebasan tersebut tak terbatas.

Batas dari hak setiap warga bangsa di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga bangsa yang lain sama pentingnya; hak warga bangsa dibatasi oleh hak warga bangsa yang lainnya.

Oleh karena itulah peran Negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga bangsa; hak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga bangsa; hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga bangsa. Inilah tugas kita bersama, untuk membangun peradaban demokrasi yang

memuliakan nilai kemanusiaan dan menjaga martabat bangsa.

Sebagai negara demokratis yang berlandaskan hukum, maka Peran negara dalam menjamin praktek demokrasi, juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara lembaga negara; Undang Undang yang mengatur kekuasaan negara dan aparaturnya; Undang Undang yang mengatur pemenuhan hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya rakyat; Undang Undang yang mengatur jalanya pembangunan nasional; Undang Undang yang mengatur ketertiban umum, dan lain sebagainya.

Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Kualitas demokrasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kita semua, pelaku-pelaku demokrasi; Pemerintah, DPR, MK, MA, BPK, TNI, POLRI, Lembaga Lembaga Negara, serta Rakyat Indonesia, yaitu bagaimana kita melakukan kerja bersama dalam merubah

cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang dapat membawa kemajuan peradaban demokrasi;

Dalam era globalisasi dan kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi saat ini, membawa kita berada di dalam pertarungan nilai-nilai cara pikir, cara kerja, dan cara hidup; nilai kebangsaan, nilai etika, sopan santun, pantas tidak pantas, nilai kebebasan, nilai perjuangan, dan lain sebagainya.

Kita tidak bisa lagi menutup ruang dinamika dan dialektika tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang perlu menjadi komitmen kita bersama adalah menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang tetap berlandaskan pada Pancasila, berkonstitusi UUD NRI 1945, NKRI, dan bermasyarakat yang bhineka tunggal ika.

Negara Indonesia diwariskan dari generasi ke generasi; dan menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga, merawat dan membangun kemajuannya;

DPR RI ikut memiliki tanggung jawab dalam membangun demokrasi yang semakin berkeadaban dan maju; kita semakin dituntut untuk dapat menjalankan kedaulatan rakyat yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat; kita semakin dituntut untuk memiliki kehormatan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya; marilah kita kerjakan tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan fungsi di bidang legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyelesaikan 11 (*sebelas*) Rancangan Undang Undang menjadi Undang Undang, 2 (*dua*) diantaranya adalah Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu, DPR RI telah menetapkan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi Usul Inisiatif DPR RI, yang pembahasannya akan dilakukan secara komprehensif dan memperhatikan masukan serta aspirasi dari berbagai pihak. RUU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional kita dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga.

Pembentukan suatu Undang Undang adalah pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama, Pemerintah dan DPR RI. Oleh karena itu, kinerja legislasi merupakan kerja bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada masa persidangan ini DPR RI terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Realisasi anggaran hingga Triwulan I ini sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah. Selain cepat, tepat, dan efektif, APBN tahun ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, waspada, antisipatif, serta responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian.

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga terus memastikan dan mengingatkan Pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada

realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang langsung dirasakan oleh rakyat.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI melalui Alat Kelengkapan DPR RI telah melakukan berbagai rapat yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan bahan pokok serta kesiapan menghadapi arus mudik lebaran;
2. Permasalahan pakaian bekas impor (thriftling);
3. Peningkatan produksi serta produktivitas komoditas pertanian;
4. Permasalahan pengelolaan jalan tol;
5. Mitigasi Badan Usaha Milik Negara menghadapi potensi resesi ekonomi 2023;
6. Rencana impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang;

7. Penanganan dampak insiden Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang serta mitigasi risiko kebakaran di kilang minyak dan TBBM;
8. Percepatan pembentukan Satgas Ilegal Mining;
9. Integrasi kebijakan penyediaan buku bacaan untuk literasi antarkementerian/lembaga; dan
10. Evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.
11. penanganan Permasalahan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)

Selama Masa Persidangan IV Tahun ini, DPR RI juga telah melaksanakan *fit and proper test* terhadap:

1. Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028;
2. Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2022-2023;
3. Calon Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2022-2027; dan
4. Pemberian kewarganegaraan kepada 3 (*tiga*) pemain sepak bola dan 1 (*satu*) pemain basket.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2024, DPR RI meminta agar penyelenggara pemilu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pesta demokrasi tersebut.

Permasalahan penyelenggara pemilu dengan partai politik harus dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, lembaga penyiaran sebagai media publik yang mampu menjangkau masyarakat sampai tingkat desa diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap terkait tahapan dan penyelenggaraan pemilu, termasuk berperan serta untuk ikut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mengawal proses demokrasi sampai pelaksanaan pemilihan umum tersebut selesai.

DPR RI, ikut menyesalkan dan prihatin atas Pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia; Indonesia kehilangan kesempatan menampilkan prestasi anak muda Indonesia di panggung internasional: Indonesia juga kehilangan kesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang maju dan mampu menyelenggarakan event dunia dengan sukses.

Pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia adalah sepenuhnya kewenangan dan keputusan FIFA.

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait akan selalu mendukung pembangunan sepakbola Indonesia yang semakin maju dan berprestasi. Pada saat yang sama, pemerintah bersama PSSI agar dapat membangun sistem pembinaan dan kompetisi sepak bola yang baik di dalam negeri, sehingga menghasilkan talenta talenta pesepakbola nasional yang profesional dan berprestasi. Sehingga dengan tim sepakbola Indonesia yang berprestasi akan dapat menjadi peserta Piala Dunia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan diplomasi parlemen dunia, DPR RI melalui BKSAP telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkontribusi terhadap penguatan kerja sama internasional serta multilateralisme.

DPR RI akan menjadi tuan rumah pada Sidang Umum *ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA)* ke-44 di Jakarta pada tanggal 5-10 Agustus 2023 yang akan dihadiri oleh 500 orang yang terdiri dari Anggota Parlemen dari 10 negara ASEAN, 20 Negara Observer dan perwakilan dari 12 Organisasi Internasional.

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang AIPA, DPR RI sedang mempersiapkan seluruh rangkaian

kegiatan sidang pendahuluan AIPA agar penyelenggaraan Sidang Sidang Pendahuluan AIPA dapat terselenggara dengan sukses. Melalui forum sidang AIPA, DPR RI akan mendorong dialog dan diplomasi dalam penyelesaian berbagai persoalan yang tengah dihadapi di Kawasan ASEAN.

DPR RI dengan Pemerintah akan melaksanakan bersama rangkaian sidang pendahuluan AIPA yang akan diselenggarakan di Labuhan Bajo pada tanggal 9-11 Mei 2023 dan Bogor pada tanggal 28-31 Mei 2023.

Selain itu, Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari negara Ukraina dan Denmark. Pertemuan juga dilakukan parlemen Indonesia dengan Duta Besar RI untuk Mozambik dan Malawi, Duta Besar Inggris dan Hungaria untuk Indonesia, *Asian Parliamentary for Human Right (APHR)*, serta anggota *International Parliamentary Inquiry on Myanmar (IPI)*.

Melalui pertemuan dengan kedua badan tersebut, DPR RI mencari solusi dan menyelesaikan berbagai isu, antara lain krisis Myanmar. Peran dan kerja sama DPR RI dengan parlemen negara lain dibutuhkan untuk membantu masyarakat Myanmar yang sudah mengalami berbagai kasus pelanggaran HAM dalam waktu yang lama.

Dalam Sidang Umum IPU ke-146 di Manama, Bahrain, delegasi DPR RI bersama dengan parlemen negara lainnya membahas mengenai intoleransi, terutama islamofobia yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Al-Quran, melawan intoleransi, menghilangkan diskriminasi rasial, dan mempromosikan koeksistensi damai antar-umat.

Upaya ini tentu membutuhkan dukungan banyak pihak, baik dari komunitas ASEAN maupun dunia internasional, tidak terkecuali Pemerintah Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Akhirnya saya atas nama Pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh Anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat.

Saatnya kita memasuki masa reses, untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 14 April sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.

Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat.

Saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H untuk Anggota yang beragama Islam.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti shanti om.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.**

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

Lampiran:

➤ Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU):

1. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (saat ini telah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023);
2. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. RUU tentang Landas Kontinen;
4. RUU tentang Provinsi Sumatera Utara;
5. RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan;
6. RUU tentang Provinsi Jawa Barat;
7. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. RUU tentang Provinsi Jawa Timur;
9. RUU tentang Provinsi Maluku;
10. RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah; dan
11. RUU tentang Provinsi Bali.

- **Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028:**
Perry Warjiyo

- **Calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* HAM pada Mahkamah Agung tahun 2022-2023 terpilih:**
 1. Lucas Prakoso;
 2. Imron Rosyadi;
 3. Lulik Tri Cahyaningrum.

- **Calon Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2022-2027:**
 1. Agnes Irwanti (unsur masyarakat);
 2. Agus Sudibyo (unsur pemerintah);
 3. Danang Sangga Buwana (unsur masyarakat);
 4. Hardly Stefano Fenelon Pariela (unsur masyarakat);
 5. Sifak (unsur TVRI).

- **Naturalisasi Kewarganegaraan:**
 1. Justin Quincy Hubner;
 2. Ivan Jenner;

3. Rafael William Struick;
4. Jerome Anthony Beane Jr.

➤ **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

1. Konvensi Anti-Korupsi PBB (*Parliamentary Dialogue on UNCAC and Annual General Meeting*), pada tanggal 8-9 Maret 2023 di Doha, Qatar.
2. Sidang Organisasi Parlemen Dunia ke-146 (*146th Assembly of the Inter-Parliamentary Union/IPU) and Related Meetings*), pada tanggal 11-15 Maret 2023 di Manama, Bahrain.
3. *ASEAN Women Political Leaders's Coalition for Change Meeting: Building a Cross-Country Partnership*, pada tanggal 20 Maret 2023.
4. Peringatan Hari Perempuan Internasional, "*Women to Lead: Embracing Equity in Politics*", pada tanggal 21 Maret 2023.
5. Forum Pemimpin Muda Asia (*Asia Youth Leaders Forum/AYLF*), 25-26 Maret 2023 di Guangzhou, Tiongkok.